

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme bukanlah suatu hal baru dalam dunia internasional, peristiwa tersebut merupakan isu global yang dapat mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia. Perkembangan aksi terorisme saat ini telah membuat dunia menjadi tidak aman. Hal ini dikarenakan ancaman terorisme dapat terjadi kapan saja dan di mana saja serta dapat mengancam keselamatan jiwa, termasuk warga negara Australia. Oleh karena itu, PM Howard menerbitkan kebijakan *Travel Warning* untuk negara yang rentan terhadap serangan terorisme.¹

Selain peristiwa 9/11 peristiwa terorisme lain juga menyita dunia internasional, yaitu peristiwa terorisme yang terjadi di Bali, Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, atau biasa dikenal dengan peristiwa Bom Bali I. Pada peristiwa Bom Bali I, ledakan terjadi di dua tempat berbeda, yakni Paddy's Cafe dan Sari Club, Legian. Peristiwa tersebut menewaskan 202 orang, dan 88 diantaranya adalah warga Australia.²

Pasca-Bom Bali I pada tahun yang sama peristiwa pemboman kembali terjadi di Indonesia, tepatnya pada 5 Agustus 2003 JW Marriott di Jakarta yang menewaskan 12 orang.³ Selanjutnya, 9 September 2004 peristiwa pemboman kembali terjadi di Kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang menewaskan 9 orang warga negara Australia.⁴ Setelah itu tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2005 peristiwa pemboman kembali terjadi di Bali dan menewaskan 4

¹ Foreign Affairs and Trade, *Consular Service-Travel Advice Indonesia, 13 October 2002*

² Kamedo, *The Terror Attack on Bali, Report 89*, hal 3 diakses dari www.socialstyrelsen.se, pada 11 Oktober 2014, pukul 20.45 WIB

³ *Ibid*, hal 9

⁴ *In the National Museum of Australia, Jakarta Bombing, 2006* hal 2, diakses dari http://www.nma.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/2981/FriendsDec07-Jakarta-bombing.pdf
http://www.nma.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/2981/FriendsDec07-Jakarta-bombing.pdf

orang warga negara Australia. Peristiwa pemboman untuk kedua kalinya yang terjadi di Pulau Bali ini kemudian dikenal dengan nama Bom Bali II.⁵

Setelah terjadinya peristiwa terorisme Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kontra terorisme. Respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi serangan teroris kontemporer adalah respon kebijakan cepat, yakni dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002. Kebijakan ini berisi tentang Tindak Pidana Terorisme yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan terorisme. Kebijakan ini dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 tahun 2003.⁶

Terjadinya serangkaian peristiwa terorisme di Indonesia yang menewaskan beberapa warga Negara Asing terutama Australia dan peristiwa tersebut juga menyebabkan Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap Indonesia yaitu kebijakan *Travel Warning* atau *Travel Advisory*.⁷

Kebijakan *Travel Warning* atau *Travel Advisory* merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang sama. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tulisan dan pidato PM Howard yang membahas kebijakan mengenai *Travel Warning* atau *Travel Advisory*. Meskipun kedua istilah ini memiliki pengertian yang sama, dalam draf kebijakan luar negerinya Pemerintah Australia memilih untuk menggunakan istilah *Travel Warning*.⁸

⁵ RE Tumanggor, *International Crisis Group Working to Prevent Conflict Worldwide Terrorism in Indonesia : Nordin's Network Asia Report No114*, 2007 hal 17

⁶Bappenas, "Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme", diunduh dari www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6159/ 13 Desember 2015

⁸Agnieszka Sobocinska, *Innocent lost and paradise regained Tourism to Bali and Australian perceptions of Asia*, Vol 8 No 2, (2011) diakses dari <http://journals.publishing.monash.edu.au/ojs/index.php/ha/article/download/731/756>.

Kebijakan *Travel Warning* tersebut berisikan peringatan kepada warga negara agar berhati-hati dalam melakukan perjalanan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat keamanan rendah. Kebijakan ini bertujuan agar warga negaranya menghindari tempat-tempat yang dikenal sebagai sasaran teroris.⁹

Kebijakan *Travel Warning* biasanya muncul dikarenakan beberapa faktor, seperti terjadinya ketidakstabilan politik suatu negara, ancaman terorisme atau wabah penyakit menular dari beberapa wilayah di luar negara Australia.¹⁰ Terorisme yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu ancaman terbesar dalam pencapaian kepentingan nasional Australia. Hal ini kemudian menjadi alasan diberlakukannya kebijakan *Travel Warning*.¹¹ Terorisme telah mengancam keamanan nasional Australia baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia dan menewaskan banyak warga negara Australia.¹²

Kebijakan *Travel Warning* tersebut diterbitkan ketika Australia di bawah Perdana Menteri John Howard dan berasal dari partai koalisi liberal, dimana PM Howard menang dalam pemilihan umum Australia pada 11 Maret 1996. Perdana Menteri Howard berkuasa selama empat periode, dan tercatat sebagai perdana menteri kedua terlama. Setelah Perdana Menteri Sir Robert Menzies.¹³

Dengan menangnya partai liberal dalam pemilihan umum Australia 1996, hal tersebut juga secara langsung mempengaruhi arah dan kebijakan politik negara Australia tergantung dengan kubu atau partai yang menguasai pemerintahan. Sistem pemerintahan Australia dibentuk

⁹Australian Government, *Department of Foreign Affairs and Trade*, diakses dari <http://dfat.gov.au/travel>

¹⁰ Travel Health Fact Sheet, *Travel Health Fact Sheet Indonesia*, The Travel Doctor, 2012, diakses dari http://www.traveldoctor.com.au/files/editor_upload/File/fact-sheets/9115%20TD%20Health%20Fact%20Sheet%20Indonesia.pdf, (diakses tanggal 7 September 2015, pukul 07.55 WIB)

¹¹Australian Government, *Counter Terrorism Securing Australia Protecting Our Community White Paper*, Published by the Department of the Prime Minister and Cabinet, 2010, hal 5

¹²*Ibid*, hal 7

¹³ Ikrar Nusa Bhakti, Taruhan Politik John Howard, Kompas, 7 November 2007

melalui pemilihan anggota dewan dari partai yang terlibat dalam pemilu, dimana partai dengan perolehan suara terbanyak akan menjadi partai pemerintah dan pemimpin partai tersebut akan menjadi perdana menteri dan menjalankan roda pemerintahan Australia. Kemenangan partai liberal pada tahun 1996 menjadikan John Howard sebagai pemimpin partai liberal sebagai perdana menteri Australia yang ke-25. Setelah kemenangannya tahun 1996, posisi Howard tak tergoyahkan dalam pemilihan umum 1998, 2001, dan 2004 namun posisinya tergantikan dalam pemilihan umum 2007.¹⁴

Kebijakan *Travel Warning* diberlakukan Pemerintah Australia untuk Indonesia pada tahun 2002 pasca terjadinya Bom Bali I. Peristiwa terorisme tersebut juga dinilai mengancam keamanan Australia. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PM Howard pada pidatonya sesaat setelah terjadinya serangan terorisme di Bali :

“The first responsibility of the Australian government is to protect its citizens. It is unimaginable that a government in our position would do anything other than reflect current advice in travel warnings and issues. For so long as Australian lives may be endangered in traveling to anyone particular spot anywhere in the world, the Australian government has an obligation and will properly warn its people. We have issued a number of travel warnings about Bali and about Indonesia generally in recent times but in the wake of this terrible event they certainly have an added point.”¹⁵

Pidato di atas merupakan pidato yang diberikan oleh PM Howard pasca-terjadinya Bom Bali I, tepatnya pada 12 Oktober 2002. Isi pidato tersebut merupakan bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah tersebut adalah menerbitkan kebijakan *Travel Warning* untuk Indonesia.

¹⁴ Ganewati Wuryandari, *Gaya dan Substansi Politik Luar Negeri Australia 1996-2001*, dalam kebijakan Luar negeri dan pertahanan Australia 1996-2001, eds LIPI, Jakarta, 2001 hal 20

¹⁵ *Transcript of PM's Comments on Bali Attacks*, 13 October 2002, *Full text of Prime Minister PM Howard's comments on the Bali nightclub bombing*, diakses dari <http://www.freerepublic.com/focus/news/768258/posts>

Dalam mengimplementasikan Kebijakan *Travel Warning*, Pemerintah Australia bekerja sama dengan lembaga lain seperti *National Threat Assessment Centre* (NTAC)¹⁶ dan *Department of Foreign Affairs & Trade* (DFAT). NTAC merupakan pusat penilaian ancaman nasional Australia, sedangkan DFAT bertugas untuk mempublikasikan informasi kepada masyarakat.¹⁷ Melalui DFAT Pemerintah Australia memberikan pemberitahuan dan saran keamanan perjalanan di negara tujuan bagi warga negara Australia. Saran perjalanan ini fokus pada resiko dan keamanan negara tersebut. Pemberitahuan saran keamanan ini diterbitkan pada *smartraveller*, sebuah situs resmi Pemerintah Australia yang berisi informasi dan saran terkait keamanan suatu negara untuk dikunjungi. Warga negara Australia dapat mengakses situs ini untuk mengidentifikasi dan menilai kesulitan potensial sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.¹⁸

Dalam menerapkan kebijakan *Travel Warning* Pemerintah Australia selalu memperbaharui level bepergian dan memperhatikan isu terkait terorisme yang terjadi di negara-negara lain. Selain itu, Pemerintah Australia juga memberikan peringatan terhadap warga negaranya dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama negara yang masih dianggap menjadi sasaran utama teroris.¹⁹

Dengan terjadinya peristiwa terorisme dan penerbitan kebijakan *Travel Warning* jumlah kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia mengalami fluktuasi. Jumlah kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia mengalami dinamika yang naik-turun. Pasca Bom Bali I kunjungan wisatawan Australia mengalami penurunan yang drastis, namun tidak berlangsung lama karena pada bulan Juli tahun 2003 kunjungan wisatawan Australia kembali meningkat meskipun

¹⁶ *National Threat Assessment Centre*(NTAC) terdiri dari seluruh komunitas keamanan nasional. Khusus untuk strategi kontra-terorisme, NTAC bekerja di bawah kerangka Rencana Kontijensi Nasional yang di dalamnya mengatur keberadaan Komite Nasional untuk satuan Penindak Kontra-Terrorisme Luar Negeri.

¹⁷ Cecep Saiman, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Kebijakan Travel Advisory Australia di Bawah Pemerintah Kevin Rudd*, 2009, hal 20

¹⁸ *Department of Education and Training International and Domestic Travel Policy & Guidelines for School-Based Staff*, Melbourne, 2012, hal 12

¹⁹ Cecep Saiman, hal 20

diberlakukannya *Travel Warning*. Hal tersebut membuktikan bahwa peringatan kepada warga negara Australia untuk tidak mengunjungi Indonesia tidak mengurangi animo warga negara Australia ke Indonesia (lihat tabel 1.1). Hal tersebut tidak jauh berbeda pada sebelum terjadinya peristiwa terorisme tahun 1997-2001, jumlah kunjungan wisatawan Australia berkisar antara 300 ribu-500 ribu orang.²⁰

Tabel 1.1 : Kedatangan Wisatawan Mancanegara yang Langsung ke Indonesia Berdasarkan Kebangsaan Tahun 2002 – 2007

Negara Asal	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Australia	346,245	268,538	406,389	391,862	226,981	314,432
Hongkong	78,018	72,128	79,777	74,868	78,386	76,019
India	35,063	29,895	36,169	36,679	54,346	68,908
Jepang	620,722	463,088	615,720	517,879	419,213	508,820
Republik Korea	210,581	21,070	26,103	28,253	24,257	25,675

Sumber : www.bps.go.id

Pada beberapa jurnal dan penelitian tentang kebijakan *Travel Warning* yang diberlakukan DFAT menjelaskan bahwa penerbitan kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh persepsi ancaman Pemerintah Australia terhadap Indonesia. Contohnya yaitu pada tulisan Cecep Saiman tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam menyikapi Kebijakan *Travel Warning* yang dikeluarkan Pemerintah Australia dan tulisan yang berjudul *Protecting Australians at Home and Abroad* yang dikeluarkan oleh situs Pemerintah Australia.²¹

²⁰ Deputi Bidang Akuntabilitas Statistik Kebudayaan dan Pariwisata, Dep. Kebudayaan dan Pariwisata, 2003, hal 140

²¹ Australia's National Counter-Terrorism Policy and Arrangements, *Protecting Australia Against Terrorism*, hal 28 diakses dari www.pmc.gov.au

Adanya persepsi ancaman PM Howard yang disebabkan oleh aksi terorisme di Indonesia, sehingga PM Howard berbagi dengan masyarakat melalui nasihat perjalanan khusus negara. Semua warga negara Australia di luar negeri didorong untuk mendaftarkan kehadiran mereka di luar negeri ke DFAT, dan dapat membantu kontak Pemerintah Australia dalam keadaan darurat.²² Berbeda dengan penelitian yang telah ada, penelitian ini akan meneliti pandangan persepsi ancaman Australia dalam pemberlakuan kebijakan *Travel Warning* ke negara Indonesia. Setelah peristiwa Bom Bali II tahun 2005, sampai pemerintahan PM Howard berakhir Indonesia tidak mengalami serangan terorisme, namun Pemerintah Australia masih memberlakukan kebijakan *Travel Warning*, diindikasikan bahwa PM Howard memiliki persepsi ancaman dalam penerbitan kebijakan tersebut. Sehingga penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi agar dapat mengetahui fakta-fakta terkait pemberlakuan kebijakan *Travel Warning*.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan utama dari kebijakan luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara, yang salah satunya adalah keamanan nasional.²³ Oleh karena itu untuk melindungi keamanan nasional Australia yang antara lain memerangi terorisme, spionase dan campur tangan asing serta melindungi warga negara dan infrastruktur Australia, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan luar negeri yaitu kebijakan *Travel Warning*, yang sebagai peringatan berperingan bagi warga negara Australia yang akan mengunjungi negara-negara yang rentan akan penyerangan terorisme.

²² *Ibid*, hal 61

²³ Jack C. Plano dan Roy Olton, dalam Kamus Hubungan Internasional, Bandung, 1999, hal 11

Faktor yang melatarbelakangi kebijakan *Travel Warning* diterbitkan dikarenakan dari tahun 2002 sampai 2005 terjadinya peristiwa terorisme di negara Indonesia yang menyebabkan banyak korban diantaranya adalah warga negara Australia. Kebijakan *Travel Warning* tersebut diberlakukan ke warga negara Australia, untuk tidak mengunjungi Indonesia, tetapi tidak menurunkan animo warga negara Australia untuk ke Indonesia. Setelah peristiwa Bom Bali II sampai pemerintahan PM Howard berakhir tidak ada terjadi serangan terorisme, namun Australia tidak mencabut kebijakan tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa PM Howard memiliki persepsi ancaman tersendiri dalam menerbitkan kebijakan *Travel Warning*. Sehingga hal itu yang menjadi permasalahan yang akan peneliti analisis dengan persepsi ancaman (*threat perception*).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

“ Bagaimana persepsi ancaman PM Howard yang melatarbelakangi pemberlakuan kebijakan *Travel Warning* ke Indonesia ? ”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan dinamika Kebijakan *Travel Warning* oleh Australia yang berlaku ke Indonesia pasca-terjadinya peristiwa Bom Bali I.
2. Menganalisis persepsi ancaman Australia dan pemberlakuan kebijakan *Travel Warning*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan dua jenis manfaat. Yaitu manfaat secara akademis dan secara praktis. Manfaat akademis dan praktis yang peneliti maksud yaitu sebagai berikut.

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan informasi kepustakaan Hubungan Internasional serta keilmuan lain yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri dan khususnya berkontribusi bagi kajian kawasan Oceania.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat umum sehingga masyarakat dapat memiliki tambahan wawasan yang baik mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini seperti mengenai kebijakan luar negeri. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara, terutama Indonesia.

1.6 Studi Pustaka

Pertama, peneliti mengacu pada tulisan Mark Beesonyan berjudul *Issues in Australian Foreign Policy*²⁴ tentang kebijakan luar negeri Australia terkait isu pada tahun 2001. Pada pertengahan 2001 merupakan periode penting dalam kebijakan luar negeri Australia, dua isu dalam kebijakan luar negeri Australia yaitu kebijakan imigrasi dan serangan terorisme di Amerika Serikat.²⁵ Meskipun kepentingan Australia dapat dikatakan hanya secara tidak langsung terlibat dalam insiden terakhir setelah 9/11, hal tersebut juga membayangi Australia dalam kebijakan luar negeri.

Selain mengambil langkah terkait imigran dan penyelundup Australia juga merespon peristiwa 9/11, Pemerintah Australia memainkan peran aktif dalam memerangi terorisme hal tersebut didukung dengan adanya isu bahwa Asia Tenggara diidentifikasi sebagai daerah paling potensial untuk operasi teroris.²⁶ Dengan cara Pemerintah Australia memilih mengaktifkan *Australia, New Zealand and United States Security Treaty* (ANZUS) untuk menambah legitimasi

²⁴ Mark Beeson, *Issues in Australian Foreign Policy*, *Australia Journal of Politics and History*, Volume 48, Number 2, 2002

²⁵ *Ibid*, hal 232

²⁶ *Ibid*, hal 233-234

atas tindakan Australia. Bertujuan untuk meyakinkan warga negara Australia bahwa ANZUS merupakan komponen penting dari keamanan nasional secara keseluruhan Australia.

Kedua, tulisan yang peneliti jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini buku dari Allan Gyngell dan Michael Wesley yang berjudul *Making Australian Foreign Policy*.²⁷ Buku ini mengacu pada pertanyaan penting tentang bagaimana Australia berurusan dengan negara luar. Menggambarkan peran departemen pemerintahan dan organisasi intelijen yang mendukung pembuatan kebijakan pemerintah. Buku ini membahas proses, lembaga, pihak serta perhitungan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri di Australia, dan bagaimana hal ini telah berubah di bawah pengaruh globalisasi.

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian, di mana buku ini membahas tentang peran serta proses birokrasi dalam merumuskan kebijakan luar negeri Australia. Serta dapat membantu peneliti menganalisis hubungan Australia dengan negara-negara luarnya.

Ketiga, pada jurnal Ian Mc Allister yang berjudul *Guide to Australia's National Security Capability*²⁸, jurnal ini membahas mengenai Partisipasi Australia dalam intervensi perang melawan teror tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan peranan identitas Australia. Semua kebijakan internasional Howard mengacu pada kepentingan nasional Australia, dan identitas Australia dalam perang melawan teror. Keterlibatan Australia dalam perang melawan teror adalah salah satunya, dalam rangka memperkuat aliansi dengan Amerika.²⁹ Sebenarnya interpretasi Howard dalam memahami suatu nilai dan makna intervensi perang ini dipahami tidak lebih pada sebatas interpretasi saja. Dalam sudut pandang lainnya, identitas nasional

²⁷Allan Gyngell dan Michael Wesley, *Making Australian Foreign Policy*, Cambridge University Press, Third edition, 2007

²⁸Ian Mc Allister, *Guide to Australia's National Security Capability*, *Australian Strategic Policy*, Issues 16, 2008

²⁹*Ibid*, hal 23-28

Australia dilihat pada multikulturalisme dan egalitarianisme sebagai nilai utama dalam identitas bangsa Australia. Dalam kebijakan politik luar negeri Australia, adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan politik luar negeri dari aliansi dengan Amerika, dan menyarankan bahwa kepentingan dan keamanan Australia bisa diwujudkan melalui kerja sama regional dan kekuatan diplomasi di tengah-tengah lingkungan internasional.

Keempat, mengacu pada jurnal Rt. Hon. Ann Taylor, MP dengan judul *Intelligence and Security Commitee Inquiry into Intelligence, Assessments and Advice prior to the Terrorist Bombings on Bali 12 October 2002*³⁰, bahwa FCO (*Foreign & Commonwealth Office*) yang bertanggungjawab dan berwenang untuk memberikan akses dan informasi bagi warga negara Inggris yang bepergian ke luar negeri, baik dalam bentuk perjalanan bisnis maupun wisata, tidak bisa secara akurat memperkirakan ancaman dan perkembangan yang terbaru terkait dengan hak warganya untuk mendapat akses akan informasi terutama yang menyangkut dengan keamanan mereka di luar negeri. Jadi, segala hal yang terkait dengan *travel advice* FCO, tujuannya, target pembacanya, dan sajian informasinya harus dievaluasi. Salah satunya adalah perlunya ditambah satu level lagi dari 6 level yang telah ada pada FCO yaitu level yang berada di antara level 3 (*significant*) dan 2 (*high*).

Kelima dalam jurnal Richard Sargent dan David J. Brooks, *Terrorism in Australia: A Psychometric Study into the Western Australian Public Perception of Terrorism*.³¹ Terorisme bukanlah kosep baru, teroris menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan yang sebenarnya untuk menghasilkan rasa takut pada individu, organisasi dan pemerintah. Ketakutan adalah senjata dan digunakan untuk mendapatkan tujuan politik, ideologi atau agama. Serangan teroris

³⁰Rt. Hon. Ann Taylor, MP, *Intelligence and Security Commitee Inquiry into Intelligence, Assesments and Advice prior to the Terrorist Bombings on Bali 12 October 2002*", (London , 2002)

³¹ Richard Sargent dan David J. Brooks, *Terrorism in Australia: A Psychometric Study into the Western Australian Public Perception of Terrorism*, (Proceedings of the 3rd Australian Security and Intelligence Conference 2010)

terakhir telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia, karena pemerintah memastikan bahwa strategi keamanan anti-terorisme mereka tidak memadai. Di dalam negeri, Australia memperbarui kapasitasnya untuk menanggapi peristiwa terorisme melalui peningkatan keamanan di banyak daerah dan dengan inisiatif baru seperti kampanye kontra publik terorisme 2002.³²

Terorisme yang dikenal dalam sejarah Australia yaitu insiden terjadi pada 13 Februari 1978, ketika sebuah bom pada pertemuan kepala pemerintahan *Commonwealth Heads of Government Meeting* (CHOGM) di Hotel Hilton, Sydney, menewaskan dua orang. Dalam menanggapi serangan ini, Polisi Federal Australia *Australian Federal Police* (AFP) mendirikan Pusat Data Bom Australia *Australian Bomb Data Centre* (ABDC). Menurut AFP, piagam dari ABDC adalah untuk mengumpulkan, menyusun, menafsirkan dan menyebarkan data yang dikumpulkan dari dalam Australia dan luar negeri, mengenai bahan peledak dan provokasi serangan tersebut, apakah komersial, militer atau improvisasi. Yang berkaitan dengan penjahat yang menggunakan bahan peledak untuk kepentingan mereka sendiri dan dengan orang-orang yang menggunakan bahan peledak dan bom kekerasan bermotif politik.

Analisis persepsi resiko publik dapat ditelusuri kembali ke tahun 1960-an. Resiko terorisme bukanlah fenomena baru sepanjang sejarah telah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan keuntungan politik, ideologi atau agama. Di zaman modern dapat dikatakan bahwa terorisme menjadi perhatian dunia melalui serangan 9/11, menyoroti kerentanan masyarakat.

Masalah ini penting untuk dicatat, Slovic menyatakan bahwa "persepsi resiko publik telah ditemukan untuk menentukan prioritas dan agenda legislatif dalam merumuskan undang-

³² Richard Sargent dan David J. Brooks, *Terrorism in Australia: A Psychometric Study into the Western Australian Public Perception of Terrorism*, (Proceedings of the 3rd Australian Security and Intelligence Conference 2010) hal 64

undang".³³ Setelah 9/11 dan serangan lainnya yang lebih baru memberi wawasan penting tentang bagaimana orang merasakan, dievaluasi dan menanggapi resiko tersebut. Dalam upaya untuk mencegah serangan serupa, pemerintah di seluruh dunia memperkenalkan undang-undang baru kontra-terorisme, kontrol keamanan perbatasan, perjanjian kontra-terorisme, kampanye kesadaran publik dan pembatasan imigrasi.

Persepsi resiko publik memainkan peran penting dalam perilaku dan respon mereka terhadap ancaman nyata atau yang dirasakan, dan itu untuk alasan bahwa persepsi publik memainkan peran besar dalam penelitian sosial persepsi manusia dari resiko sangat kompleks.

1.7 Kerangka Konseptual

Untuk menjabarkan persepsi ancaman PM Howard terkait terorisme yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Australia terhadap Indonesia peneliti menggunakan konsep persepsi ancaman. Berkaitan dengan penerbitan kebijakan *Travel Warning* peneliti menggunakan *The Level of Individual Decision-Makers*, dikarenakan dalam pembuatan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh individu PM Howard. Kedua konsep tersebut peneliti gunakan untuk menjelaskan persepsi ancaman yang dirasakan oleh PM Howard dan beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi ancaman tersebut sehingga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuatnya.

1.7.1 Persepsi Ancaman/ *Threat perception*

Menurut pandangan psikologi, persepsi merupakan kesadaran tunggal yang berasal dari proses sensorik ketika stimulasi muncul. Persepsi individu dipengaruhi keadaan emosional, pengolahan informasi, dan pola inferensi dan atribusi. Pada tingkat kolektif, proses persepsi lebih sulit untuk diidentifikasi. Pemahaman-pemahaman dan emosi saling dibagi dan dikomunikasikan guna menciptakan suasana kebersamaan. Dalam hal ini, ancaman dibangun secara sosial dalam

³³ *Ibid*, hal 66-70

dan di antara percakapan pribadi dan umum oleh para ahli, pemimpin politik, dan masyarakat umum.³⁴

Menurut Janice Gross Stein ada enam variabel yang mempengaruhi terkait persepsi ancaman:

1. Non-Psychological Explanations of Threat Perception

Dari sudut pandang rasionalis, persepsi ancaman merupakan perspektif pemimpin dalam melihat potensi ancaman dan perang. Pemimpin memahami suatu ancaman berdasarkan sudut pandangnya sendiri dan terkadang mengambil tindakan seperti berperang misalnya informasi dari badan-badan intelijen pemerintah dalam menilai sebuah ancaman. Hal ini dikarenakan pemimpin memiliki perbedaan persepsi terhadap suatu fenomena yang terjadi dan dipengaruhi oleh persepsi subjektifnya sendiri serta disebabkan oleh interpretasi sinyal/tanda informasi yang keliru. Interpretasi sinyal yang keliru kerap menjadi pemicu perang, meningkatnya ketegangan di antara pada masing-masing negara, dan berbagai macam krisis lainnya. Kekeliruan dalam menginterpretasi sinyal yang tidak kredibel bermuara pada ketidakakuratan dalam memandang sebuah persepsi ancaman.

Pertanda/sinyal dalam persepsi ancaman lebih ditentukan kepada pemimpin, dalam hal ini pemimpin negara yang memberikan sinyal di mana komitmen sinyalnya tidak bisa terjaga dengan baik atau tidak kredibel yang mengakibatkan kerancuan dan misinterpretasi oleh pemimpin negara yang menerima sinyal di mana hal ini berujung pada persepsi ancaman yang bias. Salah satu contohnya adalah ketika Saddam Husein dipandang tidak bisa mewujudkan komitmennya pada dunia internasional bahwa negaranya bebas dari senjata biologis dan pemusnah massal. Ketidakmampuan Saddam Husein dalam menjaga kredibilitasnya dalam

³⁴ C.O. Meyer, *International terrorism as a force of homogenization? A constructivist approach to understanding cross-national threat perceptions and responses*, (Cambridge review of international affairs, 2009), hal 647- 666

menjaga komitmen sinyalnya memicu dan mengakibatkan terjadinya perang teluk. Dengan kata lain, ketidakmampuan menjaga komitmen sinyal mengakibatkan kompleksitas persepsi ancaman penerima sinyal.

Sinyal dan persepsi ancaman menjadi makin sulit dan kompleks ketika niat dari pemberian sinyal tersebut susah dipahami karena permasalahan keamanan. Selain permasalahan sinyal, hal yang membentuk atau hal yang mengakibatkan meningkatnya persepsi ancaman adalah struktur sistem perpolitikan pada suatu negara. Kompleksitas birokrasi yang menyebabkan informasi tentang ada atau tidaknya suatu ancaman terkendala karena permasalahan waktu dan pengkoordinasian penilaian dan tindakan yang diambil terhadap persepsi ancaman tersebut.³⁵ Sebagaimana yang terjadi di Amerika ketika ada informasi mengenai potensi serangan ke WTC oleh Osama Bin Laden, karena kompleksitas birokrasi dan koordinasi serta birokrasi yang kompleks bermuara pada terjadinya serangan ke WTC oleh Osama.

Selanjutnya, sosial budaya juga merupakan hal yang membentuk persepsi ancaman. Masyarakat domestik dan identitas yang menyertainya mempengaruhi bagaimana individu pembuat keputusan memandang sebuah ancaman. Ancaman itu dibesar-besarkan karena kepercayaan emosional, informasi yang tidak lengkap, dinamika kelembagaan, dan praktek budaya. Ancaman menjadi rutinitas budaya, tertanam dalam budaya lembaga-lembaga politik. Dengan kondisi tersebut, persepsi ancaman kolektif menjadi sangat kuat melawan perubahan.³⁶ Terakhir, hal yang membentuk atau meningkatkan persepsi ancaman adalah pelanggaran norma yang diakui oleh dunia internasional secara umum.

³⁵ *Ibid*, hal 7

³⁶ *Ibid* hal 8

2. *Psychological Explanations of Threat Perception*

Penjelasan rasionalis tentang persepsi ancaman dan perang perlu dilengkapi dengan penjelasan psikologis. Psikologi mempengaruhi persepsi ancaman dan pengambilan keputusan. Kebanyakan ahli telah mengidentifikasi pola persepsi yang menyimpang dari rasionalitas dalam konteks krisis dan perang karena tidak memperhatikan untuk pengidentifikasian pola-pola persepsi ketika menilai suatu ancaman yang stabil dan rutin, atau ketika menilai ancaman namun tidak berujung pada kekerasan di mana peran psikologi lebih cenderung menjadi bagian dalam persepsi ancaman dan pengambilan keputusan.³⁷ Seperti halnya dalam kasus Saddam Husein. Seusai konflik bersenjata melawan Iran, Saddam ingin menunjukkan, khususnya pada Iran, bahwa kekuatan militer Irak semakin maju. Dia memilih untuk mengabaikan peringatan Amerika terkait pembuatan senjata biologisnya. Pilihan keputusan yang diambil Saddam dapat dijelaskan melalui sudut pandang psikologis dalam menjelaskan pola-pola persepsi ancaman.

3. *Cognitive Biases and Heuristics*

Pemikiran dan heuristik digunakan untuk mengurai kompleksitas dan mengantisipasi ketidakpastian, mengendalikan informasi, membuat kesimpulan-kesimpulan umum terkait persepsi ancaman. Reaksi terhadap ancaman lebih kepada reaksi yang bersifat antisipasi terhadap masa depan, atau ancaman yang ada di masa depan. Kadang individu, dalam hal ini termasuk staf eksekutif, pemimpin dan pengambil keputusan yang terlalu percaya diri terhadap potensi ancaman akan merasa sangat terancam dan kadang bereaksi berlebihan dan atau ketika mendapat ancaman yang keliru. Bias dalam pengambilan keputusan oleh pemimpin bersifat bereaksi berlebihan terhadap potensi ancaman.

³⁷ *Ibid*, hal 10

Psikologi kognitif telah mengidentifikasi sejumlah heuristik dan bias yang digunakan orang-orang dalam lingkungan yang tidak pasti atau berbahaya yang dapat mempengaruhi proses penilaian mereka. Heuristik merupakan jalan pintas dalam memproses informasi. Ada tiga heuristik yaitu sebagai berikut:

- Ketersediaan adalah kecenderungan orang-orang dalam menginterpretasikan informasi yang ambigu berdasarkan tingkat dan latar belakang kognitif mereka.
- Keterwakilan yaitu orang-orang yang mengaitkan potensi ancaman dengan potensi ancaman dimasa lalu dan cenderung melebihkannya atau sebaliknya, mengabaikannya.
- *Anchoring* atau Jangkar merupakan perkiraan yang berdasarkan perbandingan antara poin yang telah terlebih dahulu dijadikan acuan dengan fenomena yang ada.³⁸

4. *Loss Aversion, Framing, and Risk Propensity*

Kebutuhan untuk kesederhanaan dan konsistensi, hambatan serta kesulitan terhadap pemikiran yang memiliki kemungkinan-kemungkinan, kecenderungan berkurangnya antipati, dan efek *framing* sering dianggap sebagai penyimpangan model rasional dari pencegahan. Model rasional sebenarnya masih dipakai dan ‘penyimpangan’ ini dianggap sebagai kondisi yang membatasi. Ketahanan model psikologis sekarang didukung oleh generasi penelitian yang menetapkan pola-pola ini sebagai norma dan bukan pengecualian. Hal ini dapat dilihat pada keputusan Anwar Sadat untuk mencoba melakukan upaya dalam permasalahan ‘kepemilikan’ Sinai yang sejak tahun 1967 tidak lagi dalam wilayah kekuasaan mereka dikarenakan Anwar Sadat menempatkan dirinya bahwa Sinai telah lepas dari genggaman Mesir.

³⁸ A. Tversky, & Daniel Kahneman, *Availability: A heuristic for judging frequency and probability*, *Cognitive psychology*, (1973), hal207- 232

5. *Emotion and Threat Perception*

Emosi memainkan peran yang dominan dalam pemikiran dan kaitannya dengan persepsi ancaman. Penelitian tentang emosi memiliki dampak yang signifikan terhadap analisis berbagai isu global: teori pencegahan, sinyal, pembatasan nuklir, perang, dan teror. Emosi mengambil peran yang pertama karena bersifat otomatis dan cepat, yang beroperasi di bawah ambang kesadaran, dan memainkan peran yang dominan dalam membentuk persepsi dan perilaku. Emosi membawa informasi kepada orang-orang tentang proses bawah sadar mereka yang kemudian menjadi pikiran dan perasaan sadar dan mempengaruhi persepsi dan keyakinan mereka.³⁹

Ada beberapa faktor yang berkenaan dengan emosi yang meningkatkan persepsi ancaman, diantaranya adalah ketakutan. Ketakutan merupakan faktor emosi yang dapat meningkatkan persepsi ancaman. Persepsi ancaman tetap tinggi meskipun tidak ada serangan besar namun hal tersebut masih bagian dari fokus publik dan politik.⁴⁰ Selain ketakutan, penghinaan dan kredibilitas dalam menangkal ancaman adalah faktor-faktor yang bersifat emosional yang mampu meningkatkan dan mempengaruhi persepi ancaman.

6. *Emotion and Collective Appraisal*

Ancaman dan penghinaan yang tertuju pada suatu negara memicu emosi masing-masing individu, salah satunya adalah ketakutan. Ketakutan adalah keadaan emosional dan merupakan salah satu indikator pesimisme tentang masa depan. Sebuah integrasi psikologi yg dimasukkan dalam kajian teori hubungan internasional, dan bersandingan dengan teori rasional.⁴¹

Ketakutan dan Emosi individu-individu ini pada akhirnya bermuara pada emosi yang bersifat kolektif. Hal ini dapat terjadi, atau bertambah, dikarenakan oleh pernyataan atau sikap pemimpin politik, diskusi-diskusi atau berupa pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh dan pengamat

³⁹Janice Gross Stein, hal 25

⁴⁰*Ibid*, hal 27

⁴¹*Ibid*,hal 38

politik yang kerap didengar publik di media massa, serta didukung oleh praktik atau kebijakan yang merupakan reaksi dari persepsi ancaman oleh pemimpin politik.

Emosi individu ini menjadi emosi yang bersifat nasional, atau emosi sebuah bangsa yang dipicu dan berkembang atas dasar penilaian kolektif dengan identitas sosial yang sama. Pada akhirnya, emosi yang bersifat nasional ini menjadi salah satu faktor penentu yang mempengaruhi, atau sebagai bahan pertimbangan dalam persepsi ancaman.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan semua indikator merupakan titik tolak yang akan menjelaskan situasi atau ancaman dari terorisme yang terjadi di Indonesia yang menciptakan persepsi ancaman bagi PM Howard terhadap Indonesia. Konsep persepsi ancaman ini juga akan menjelaskan apa saja yang mempengaruhi persepsi ancaman PM Howard dalam pembuatan kebijakan luar negerinya melalui kebijakan *Travel Warning*. Persepsi ancaman inilah yang akan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat oleh PM Howard.

1.7.2. *The Level of the Individual Decision-Maker*

Setelah menjelaskan ancaman Australia terkait peristiwa terorisme dengan teori persepsi ancaman, sehingga persepsi ancaman Australia tersebut mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri *Travel Warning*. Menurut Robert Jackson, ada banyak pengaruh dan hambatan dalam membuat kebijakan luar negeri. Hambatan dan batasan-batasan tersebut berhubungan dengan individu dalam memproses informasi. Setiap individu mengembangkan kepercayaan dan sudut pandang pribadinya terhadap lingkungan baik fisik maupun sosial. Kepercayaan ini berguna untuk mempermudah dan membentuk pandangan terhadap dunia luar.⁴²

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya,

⁴² Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations Theories and Approaches* hal 235

dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.⁴³ Ada dua faktor determinan yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan peran pemimpin negara, pengaruh kelompok, politik domestik dan oposisi. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan internasional menjadi faktor tertentu dalam mempengaruhi kebijakan untuk bereaksi pada isu tersebut.⁴⁴

Para pemimpin nasional dapat membuat keputusan yang rasional untuk kepentingan nasional. Keputusan individu mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan dari pembuat keputusan. Pengambil keputusan individu tidak hanya memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda, tetapi juga memiliki kepribadian unik, pengalaman pribadi, kemampuan intelektual, dan gaya pribadi membuat keputusan, bagaimana psikologi individu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Pendekatan psikoanalitik berpendapat bahwa kepribadian mencerminkan pengaruh alam bawah sadar dari pengalaman masa kecil.⁴⁵

Proses kognitif dan pendekatan psikologi juga memfokuskan pada pembuatan kebijakan, khusus kepada aspek psikologi pembuatan keputusan tersebut.⁴⁶ Pembuatan kebijakan adalah proses awal di mana keputusan dilakukan sebagai hasil umpan balik dari dunia luar. Dalam proses pembuatan kebijakan aktor negara menetapkan tujuan, mengevaluasi kepentingan relatif, menghitung untung dan rugi dari setiap tindakan yang dilakukan, kemudian menetapkan salah satu kebijakan dengan keuntungan tinggi dan biaya rendah.⁴⁷

⁴³ Jack C. Plano dan Roy Olton. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, 1999. hal. 5.

⁴⁴ Valerie M. Hudson, "The History and Evolution of Foreign Policy Analysis," dalam *Foreign Policy: Theories; Actor; Case*, ed. Steve Smith et al. (New York: Oxford University Press, 2008) hal 21

⁴⁵ Nancy Collins. *A Legacy of Strength and Love [interview with President Clinton]*. *Good Housekeeping* 221(5), 1995 hal 113–15.

⁴⁶ Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics* Princeton, New Jersey Princeton University Press 1976, hal 217

⁴⁷ Richard K. Herrmann, and Michael P. Fischerkeller. *Beyond the Enemy Image and the Spiral Model: Cognitive-Strategic Research after the Cold War*. *International Organization* 49 (3), 1995: 415–50. Mercer,

Variabel individu pembuat kebijakan seperti Kepala Negara, khususnya mengenai kesan, persepsi dan karakteristik pribadinya yang menentukan corak politik luar negeri, menjelaskan bagaimana faktor-faktor internal individu kepala pemerintahan dapat memengaruhi perilaku dalam hal pembuatan kebijakan luar negeri.⁴⁸

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara, fokus utamanya adalah melihat peran pemimpin negara. Dengan menggunakan sudut pandang individu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana faktor individu PM Howard mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri dalam konteks ini merupakan keputusan sebagai bentuk dari akumulasi perilaku negara dalam interaksinya dengan negara lain. Kebijakan luar negeri dirumuskan di dalam negeri yang kemudian diimplementasikan keluar sebagai upaya mencapai kepentingan nasional.⁴⁹

Pembuat kebijakan dalam sebuah negara memiliki makna khusus, selain sebagai panutan masyarakat, seorang pembuat kebijakan dapat bertindak sebagai eksekutor. Dengan menjadi seorang eksekutor, segala yang telah diputuskan dapat dijalankan. Dalam membahas masalah persepsi ancaman yang dimiliki suatu negara, hal ini tidak terlepas dari paradigma yang dianut oleh pembuat keputusan.⁵⁰ Presiden dan agen-agen pemerintahan dalam negara berperan penting dalam membuat keputusan atau kebijakan. Paradigma seorang atau lembaga pembuat keputusan tersebut menentukan sifat dan esensi sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Dalam

Jonathan L. *Reputation and International Politics*. Cornell, 1996. O'Reilly, K. P. Perceiving Rogue States: The Use of the "Rogue State" Concept by U.S. Foreign Policy Elites. *Foreign Policy Analysis* 3 (4), 2007 hal. 295–315.

⁴⁸ James N. Rosenau *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York : Nichols Publishing Company, 1980. Hal 252.

⁴⁹ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Bandung: CV Sinar Baru, 1992, hal 29-30

⁵⁰ Ole R. Holsti, "The Belief System and National Images: A Case Study" dalam James N. Rosenau ed., 2004. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: Free Press. 1969. hal 25

halnya dengan persepsi ancaman, paradigma seorang atau lembaga pembuat keputusan ini berperan cukup signifikan.⁵¹

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu hasil dari suatu *decision making process*. Sehingga konsep *The Level of the Individual Decision-Maker* ini akan membantu peneliti untuk menjelaskan peran individu yang dalam hal ini PM Howard dalam membuat kebijakan luar negeri *Travel Warning* yang dipengaruhi oleh persepsi ancaman.

Metodologi Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perbuatan manusia, tanpa adanya upaya untuk mengangkakan data yang telah diperoleh. Penelitian ini tidak berupaya untuk mengangkakan kata-kata dan objek yang teliti.⁵² Disamping itu pendekatan yang peneliti pilih adalah pendekatan kualitatif deskriptif analisis, di mana tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai kejadian spesifik yang dialami oleh individu maupun suatu kelompok.⁵³

Penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menginterpretasikan kondisi-kondisi kontemporer, serta penelitian ini fokus terhadap kondisi, praktek, stuktur dan perbedaan atau hubungan yang ada, opini serta proses yang sedang

⁵¹ Graham T Allison, dan Philip Zelikow, *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis*. Addison-Wesley Educational Publishers Inc. 1999.

⁵² Prof. Dr. Afrizal, M.A., *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal 17

⁵³ Vickie A. Lambert, Clinton E. Lambert, *Qualitative Descriptive Research : An Acceptable Desain*, 2012, hal 2

berlangsung atau menjadi trend pada waktu tertentu.⁵⁴ Sedangkan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan maksud untuk melakukan penelitian terhadap suatu fenomena secara mendalam. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang diteliti, serta dapat menghubungkannya dengan konsep “persepsi ancaman dan pengambilan kebijakan di level individu” yang dipakai oleh peneliti.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis ini peneliti berusaha membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini juga memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, dan utuh. Melalui penelitian ini peneliti berharap bisa mengungkapkan bukti - bukti baru terkait dengan masalah kebijakan *Travel Warning* yang dikeluarkan PM Howard.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian menggunakan rentang waktu 1996-2007, dan akan lebih menjadi acuan mulai tahun 2002 dikarenakan tahun tersebut merupakan awal penerbitan kebijakan *Travel Warning* ke Indonesia dan sampai 2007 merupakan batas tahun pemerintahan PM Howard.

1.8.3 Unit Analisis dan Level Analisis

Menurut Mohtar Mas’oed, unit analisis yaitu perilaku yang hendak kita deskripsikan dan jelaskan.⁵⁵ Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, aktor yang menjadi objek analisis yaitu PM Howard. Unit eksplanasi penelitian ini adalah terorisme di Indonesia. Menurut Mochtar Mas’oed, terdapat lima tingkat analisis, yaitu individu, kelompok, negara dan bangsa, kelompok

⁵⁴ Descriptive Research, diakses dari, http://www.mu.ac.in/myweb_test/Research%20Methodology-Paper-3/Chapter-5.pdf, pada 16 November 2014

⁵⁵ Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional : *Disiplin dan Metodologi*, LP3S, Jakarta 1990, hal 37-39

negara-negara dalam suatu *region*, dan sistem internasional.⁵⁶ Level analisis penelitian ini adalah sistem internasional, dimana perubahan atau dinamika didalam sistem internasional menentukan perilaku aktor-aktor Hubungan Internasional.⁵⁷

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan data sekunder sebagai alat untuk mengumpulkan data-data yang peneliti butuhkan dalam mengembangkan penelitian ini. Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti melalui buku, artikel, tabel, catatan, jurnal, majalah dan media elektronik melalui media internet. Data tersebut bisa berupa data-data kuantitatif maupun kualitatif.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti secara detail akan meneliti dan menganalisis mengenai persepsi ancaman PM Howard dalam menerapkan *Travel Warning*. Sehingga data tersebut menjadi makna untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan banyaknya sumber informasi yang diperoleh, maka peneliti melakukan proses seleksi dan pemilihan atas sumber, dokumen, dan informasi yang dianggap relevan yang kemudian akan dideskripsikan berdasarkan pemahaman peneliti.⁵⁸ Analisis data yang akan dilakukan peneliti

⁵⁶ *Ibid*, hal 40

⁵⁷ *Ibid* hal 40

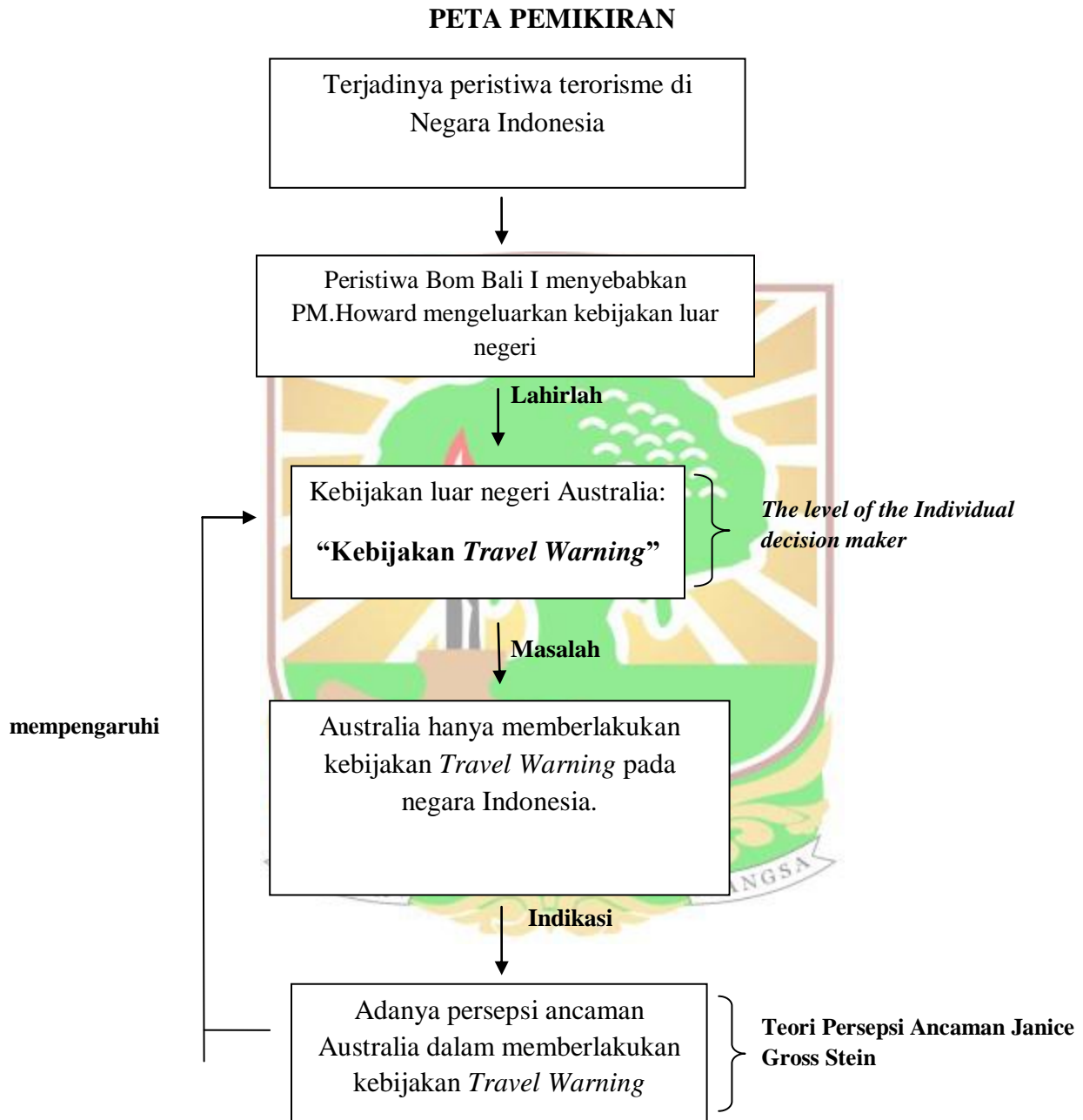
⁵⁸ Ulber Silalahi, "*Metode Penelitian Sosial*", Unpar, Bandung, 2006, hal 311

pertama, data-data yang berkaitan dengan *Travel Warning* terkumpul, menjadi sebuah kejadian yang berurutan dan dideskripsikan. Ketiga, data-data tersebut dianalisis menggunakan persepsi ancaman dan kebijakan luar negeri.



Untuk memudahkan proses analisis maka peneliti menggunakan peta pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1 : Peta Pemikiran



1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pengantar yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II Isu Terorisme di Indonesia

Bab ini akan mendeskripsikan tentang isu terorisme dan terorisme di Indonesia.

BAB III Dinamika Hubungan Australia-Indonesia dan Kebijakan *Travel Warning*

Bab ini akan menjabarkan wisatawan Australia dan dinamika hubungan Australia dan Indonesia.

BAB IV Analisis Persepsi ancaman terkait Pemerintahan PM Howard dalam Kebijakan Luar Negeri *Travel Warning*

Bab ini akan menganalisis persepsi ancaman terkait pemerintahan Perdana Menteri Howard dan Kebijakan *Travel Warning*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan ide-ide dan pengetahuan terpenting yang penulis ciptakan dari penelitian dan cakupan kontribusi yang bisa diberikan untuk lingkungan akademis.

